



## **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 188.4/4/SULBAR/I/2019**

#### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Provinsi Sulawesi Barat, perlu ditunjuk kembali Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyuluhan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- Menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas, Kewajiban dan Wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun RKA-PD;
  - b. menyusun DPA-PD;

- beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

- : Bendahara mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan tata usaha keuangan dan pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bertanggung jawab atas isi kas dan keselamatan kas; dan
  - c. selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, harus menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas bulan sebelumnya kepada Gubernur Sulawesi Barat Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 2 Januari 2019  
**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**H. M. ALI BAAL MASDAR**

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada :

1. Inspektur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 188.4/4/SULBAR/I/2019  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019  
 TENTANG : PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

**NAMA-NAMA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2 SERETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	3 Dr. MUHAMMAD IDRIS, M.Si NIP. 19641115 199303 1 001 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	4 MUH. RISVAN DWI PUTRA NIP. 19860925 201001 1 018 PENATA MUDA, III/a	5 TAHMID, A.Md NIP. 19771031 200801 1 009 PENGATUR Tk.I, II/d TAUPAN NIP. 19810302 201001 1 015 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b	6	7
2	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Dr. MUHAMMAD IDRIS, M.Si NIP. 19641115 199303 1 001 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	JUSNIATI, A.Md NIP. 19820610 200804 2 005 PENATA MUDA Tk.I, III/b	DAHLIANA, A.Md NIP. 19791213 201101 2 006 PENGATUR Tk.I, II/a	HASMUDDIN, S.Pd NIP. 19810424 201001 1 019 PENATA MUDA Tk.I, III/b	
3	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. AMUJIB, MM 19720511 199303 1 010 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	ZAKIYA DARAJAT, SE NIP. 19821018 201504 2 001 PENATA MUDA, III/a	RASMAN NIP. 19730520 201001 1 007 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b SANRIANY X NIP. 19781012 201001 2 007 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b		
4	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	SAFARUDDIN SANUSI DM, S.Sos.MAP NIP. 19721231 199402 1 017 PEMBINA Tk.I, IV/b	ANNAS, SE NIP. 19840217 201001 1 020 PENATA MUDA, III/a	DWI AGUSTRIYANTI, A.Md NIP. 19810823 200801 2 014 PENATA MUDA, III/a JUMIYANTI LATIF, SE NIP. 19861014 201001 2 037 PENATA MUDA, III/a SUKRI, SE NIP. 19810627 200604 1 010 PENATA MUDA Tk.I, III/b		
5	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	SAFARUDDIN SANUSI DM, S.Sos.MAP NIP. 19721231 199402 1 017 PEMBINA Tk.I, IV/b	YUDI SAPUTRA, A.Md NIP. 19830407 201001 1 021 PENATA MUDA, III/a			
6	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	SURYADI, SE NIP. 19671230 198803 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	SRWULAN, A.Md Kom, SE NIP. 19860123 201101 2 016 PENGATUR Tk.I, II/d	MESRAWATI, SE NIP. 19770212 201101 2 004 PENATA MUDA Tk.I, III/b DEWI, SE NIP. 19781015 201410 2 003 PENATA MUDA Tk.I, III/b MULYANI NIP. 19851025 201001 2 035 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b		

NO	NAMA ORGANISASI BERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG	BENDAHARA BENDELJARAN	PENBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAH/ PENERIMA POMBAK
1	2	3	4	5	6	7
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Dr. ARIFUDDIN, M. Pd NIP. 19021231 198903 1 269 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	IRWAN SWARUDDIN, SE NIP. 19831228 201001 1 025 PENATA MUDA, III/a	MARFATIHA, SE NIP. 19731225 200701 2 015 PENATA MUDA Tk.I, III/b MURRAYATI NAIM NIP. 19850712 201001 2 040 PENGAJUR MUDA Tk.I, II/b DALMA, A.Md NIP. 19820112 201001 2 027 PENGAJUR Tk.I, II/d ASMA NUR M. S.Pd NIP. 19820223 201410 2 006 PENATA MUDA, III/a		
8	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Dr. H. ACHMAD AZIS, M.Kes NIP. 19690515 198903 1 010 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	MANDAWAH, SKM NIP. 19840517 201101 2 018 PENATA MUDA Tk.I, III/b	MURTIADI M. NAWDIR, S.Pd NIP. 19830523 200902 2 004 PENATA, III/c SRI WAHYUNI, SKM NIP. 19861228 201001 2 014 PENATA MUDA Tk.I, III/b SITI IMAMON, S.AO NIP. 19740410 201410 2 005 PENATA MUDA Tk.I, III/b PTIRAVATI SULAIMAN NIP. 19860512 201410 2 002 PENATA MUDA, III/c RAHMAWATI NIP. 19860525 201408 2 001 PENGAJUR MUDA, II/a NARVAN NIP. 19860514 201408 2 002 PENGAJUR MUDA, II/a MICHAMMAD AWALUDDIN, ST NIP. 19860101 201001 1 018 PENATA, III/c SAIR M NIP. 19660502 201001 1 004 PENGAJUR MUDA Tk.I, II/b AKRIWAN, S.Ip NIP. 19840809 201001 1 028 PENATA MUDA, III/a LAIFYANI NIP. 19830525 201504 2 003 PENATA MUDA, III/a RUSMI, A.Md NIP. 19800318 201001 2 020 PENGAJUR, II/c	ABFAN, SE NIP. 19831101 201001 1 024 PENATA MUDA, III/a	ABD RAHMAN B NIP. 19720602 2007 PENATA MUDA, III
9	DINAS PERUMAHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI BARAT	Ir. IL KASARUDDIN, MM NIP. 19601222 198611 1 001 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/a	SURIANTI, SE NIP. 19801010 200701 2 030 PENATA MUDA, III/a			
10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMAHAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Ir. BEBAS MANGGAZATI, M.Si NIP. 19640903 199403 1 006 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	ARIANTI RAUF, ST NIP. 19800920 201001 2 026 PENATA MUDA Tk.I, III/b			
11	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	Ir. AKRAM DAL, SE, M.Si NIP. 19761015 200112 1 006 PEMBINA Tk.I, IV/b	ARHAM, SE NIP. 19801002 201001 1 021 PENATA MUDA, III/a			

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELOLA	PENYALUR BENDAHARA PENGELOLA	BENDAHARA PENERIMA
1	2	3	4	5	6
12	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI BARAT	DR. MADDARESKI SALATIN, M.Si NIP. 19711214 199202 1 001 PEMERINTAH UTAMA MADYA, IV/d	ISWADI, S.P NIP. 19851210 201504 1 002 PENYALUR MUDA, II/a	MURALITA RAHMAN, S.P NIP. 19800331 201001 2 018 PENYALUR MUDA TR.L. III/b	
13	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENYUJUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT	Hj. DAIRAWATI, S.P., MM NIP. 19720713 200003 2 003 PEMERINTAH UTAMA MUDA, IV/c	SAPRANI, K. SE NIP. 19800608 200901 2 004 PENYALUR MUDA, III/a	MUR. KIZAL, S.SOS NIP. 19801010 200801 1 015 PENYALUR MUDA, III/a	
14	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	H. RIDWAN, SE, M.Si NIP. 19901231 198702 1 050 PEMERINTAH UTAMA MADYA, IV/d	RACHMAWATI AGUSTIN, SE NIP. 19780120 201001 2 011 PENYALUR MUDA, III/a	Hj. ARISSA KADIR, SE NIP. 19710916 201410 2 003 PENYALUR MUDA, III/a	
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT	Dr. H. FATMAH, MM NIP. 19590419 198703 2 004 PEMERINTAH UTAMA MADYA, IV/a	MLO ROSLAN NIP. 19800910 201504 1 002 PENYALUR MUDA, III/a	DESIANA MALINDO, S.Si NIP. 19821231 200902 2 005 PENYALUR MUDA, III/a	
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. MELHANNKAD UHAMA BORAHIMA NIP. 19690319 198801 1 001 PEMERINTAH UTAMA MADYA, IV/d	YENANGI NGIANTI NIP. 19812010 201001 2 020 PENYALUR MUDA TR.L. II/b	LAURENTA LONDONGALLO NIP. 19811029 201001 2 006 PENYALUR MUDA III/a	
				FAIRAWATI NIP. 19890520 201001 2 002 PENYALUR MUDA TR.L. II/b	
				ARMAN NIP. 19840120 201001 1 014 PENYALUR MUDA TR.L. II/b	

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAH/ PENERIM PEMBAN
1	2	3	4	5	6	7
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI BARAT	MUHAMMAD JAVUN, S. IP, MM NIP. 19720501 199202 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	JUMIATI, SE NIP.19811231 201001 2 043 PENATA MUDA, III/a	DAVID, S.IP NIP.19730127 200901 1 003 PENATA, III/c DARMAWATI, SE NIP. 19850615 201001 2 054 PENATA MUDA, III/a ARMAN, A.Md NIP.19780807 201001 1 011 PENATA MUDA, III/a		
18	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. H. KHAERUDDIN ANAS, M.Si NIP. 19651127 198603 1 009 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	MARNI, SE NIP.19810404 201001 2 030 PENATA MUDA, III/a	NURANI, SE NIP. 19810131 201001 2 021 PENATA MUDA Tk.I, III/b YOHANIS SAPAN, SE NIP.19830120 201504 1 003 PENATA MUDA, III/a ALBI, S.Hi NIP.19831115 201504 1 001 PENATA MUDA, III/a	TAUFIK, A.Md NIP. 19820112 201101 1 008 PENGATUR Tk.I, II/d	
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM NIP. 19610101 198803 1 027 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	RAHMAYANTI, SE NIP.19801201 201001 2 027 PENATA MUDA, III/a	FAJAR OKTAVIANI MASDAR, SE NIP.19851028 201001 2 052 PENATA MUDA, III/a YERANTO NIP. 19870428 201001 1 003 PENATA MUDA, III/a MURSYID NIP.19800307 201001 1 019 PENGATUR MUDA Tk.I, II/d		
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	H. BAHHTAR HS., S.E., MH. NIP. 19620707 199208 1 002 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	AHMAD AMIRUDDIN, A.Md.Kom NIP. 19850502 200804 1 003 PENATA MUDA, III/a	ERLIN JAYANTI NIP. 19860725 201001 2 038 PENGATUR MUDA Tk.I, II/d JAMILA A NIP.19850702 201001 2 038 PENGATUR MUDA Tk.I, II/d MUHAMMAD HASBI NIP. 19801229 201001 1 019 PENGATUR MUDA Tk.I, II/d		
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI BARAT	H. MUHAMMAD HAMZIH, S.Ag, MM NIP. 19670313 199803 1 003 PEMBINA Tk.I, IV/b	IDHAN HALIQ, SE NIP. 19820802 201410 1 002 PENATA MUDA, III/a	SUKMAWATI, S.Pd NIP.19770224 201001 2 006 PENATA MUDA Tk.I, III/b AISYAH FACHRY, A.Md NIP. 19840426 200902 2 007 PENATA MUDA, III/a MAS'AD, A.Md NIP.19800428 201408 1 001 PENGATUR, II/c		

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELOMPOK	PENYELANGGULAI	BENDAHARA PENERIMA
1					
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Dra. DARMAWATI, MM NIP. 19660919 199303 2 010 PEMBINA TK.I, IV/b	MUHAMMAD AMIN, S.A.P NIP. 19820817 201101 1 013 PENATA MUDA, III/a	MERCY SRIWASTY, SE NIP. 19810908 201001 2 016 PENATA, III/c NURAEINI, S.A.P NIP. 19840913 201101 2 014 PENATA MUDA, III/a MASITA NIP. 19851115 201502 2 001 JURU, I/c	
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	I. H. PARMAN PARAKKASI, M.Sc NIP. 19691212 199403 1 004 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	AHMADI, ST NIP. 19720508 201101 1 002 PENATA MUDA TK.I, III/b	NORMAH, SP NIP. 19800225 201001 2 026 PENATA MUDA, III/a SELJISTAWATI, A.Md.Pi NIP. 19870907 201403 2 001 PENGATUR, II/c SATRIANI NIP. 19811229 201504 2 001 PENGATUR MUDA, II/a	
24	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. FARID WAJDI, M.Pd NIP. 19690610 199503 1 012 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	NURHASANAH, SE NIP. 19781006 201001 2 016 PENATA MUDA TK.I, III/b	DIRMAYANTI, SE NIP. 19801216 200903 2 007 PENATA, III/c RAHAMAYUNIRA NIP. 19811023 201001 2 010 PENGATUR, II/c DZAKIYAH INDRANTI, A.Md NIP. 19770607 201101 2 003 PENGATUR, II/c	HARSAWATI, S.Ip NIP. 19780224 200902 2 001 PENATA, III/c
25	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT	I. H. TANAWALI, M.AP NIP. 19611231 198803 1 204 PEMBINA TK.I, IV/b	NURDAWATI JUSMAN, S.Tp. NIP. 19841026201410 2 002 PENATA MUDA, III/a	ASNI RAMMA, SE NIP. 19800829 201001 2 023 PENATA MUDA, III/a ZULFIANI EFFENDI, SP NIP. 19850806 201101 2 020 PENATA MUDA, III/a IDHAM, A.Md.P NIP. 19800607 201001 1 029 PENGATUR TK.I, II/d	MUHAMMAD HATTA, SE NIP. 19800728 201001 1 016 PENATA MUDA, III/a
26	DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	I. H. FAKHRUDDIN HD NIP. 19620920 199403 1 003 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	HERMAWANTO, S.Hut NIP. 19821003 201403 1 002 PENATA MUDA TK, III/b	A. SUKMAWATI, ST NIP. 19730419 201001 2 003 PENATA MUDA TK.I, III/b ASNA BUNGA TODING, SE NIP. 19800817 201101 2 016 PENATA MUDA TK.I, III/b SRI WAHYUNIWILAN SARI, A.Ma NIP. 19830606 201001 2 039 PENGATUR, II/c	H. HAMKA FATTAH, S.Ip, M.Si NIP. 19761227 199803 1 008 PENATA TK.I, III/d
				ROBIHARTO NIP. 19860224 201001 2 001 PENATA MUDA, III (UPTD KALUKKU) MAS'UD, A.Md NIP. 19800607 201001 2 001 PENGATUR TK.I, II (UPTD POLEWALI)	AKHMAD SUAIB, S NIP. 19691114 199803 1 008 PENATA TK.I, III/d CECEP SUPRIYAN NIP. 19720220 199803 1 008 PENATA MUDA TK



NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBAHTU BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAH/ PENERIM/ PEMBAR	
1	2	3	4	5	6	7	
27	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI BARAT	AMRI EKASAKTI, ST NIP. 19670704 199403 1 022 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	ARMAWATI, ST NIP. 19780520 201001 2 018 PENATA MUDA Tk.I, III/b	ASMANI NIP. 19750121 201504 2 001 PENATA MUDA, III/a NURRIL HANAFI NIP. 19770428 200801 2 014 PENGATUR, II/c NORMAWATI NIP. 19740705 201001 2 004 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b SURYA DHARMAWAN NIP. 19840820 201001 1 030 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b ANDI YUNI ANDRIANI NIP. 19850724 201001 2 040 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b RHONI SAPUTRA NIP. 19810612 201101 1 015 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b UMMI ALIM NAIM, SE NIP. 19790531 200604 2 026 PENATA Tk.I, III/d SAHRUNI, SE NIP. 19780116 201101 1 015 PENATA MUDA Tk.I, III/b ASTUTI NIP. 19850902 201410 2 001 JURU Tk.I, I/d NIRWANAMAS Y. TABOMBANG, A. Md NIP. 19781120 201001 2 015 PENGATUR Tk.I, II/d RINA KURNIAWATI NIP. 19860312 201001 2 038 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b YUSRAN NIP. 19830815 201001 1 038 PENGATUR MUDA Tk. I, II/b			
28	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. H. AMIR MARGAR, MM. NIP. 19640309 198903 1 009 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	ZULKIFLI, SE NIP. 19820320 201504 1 0018 PENATA MUDA, III/a				
29	DINAS TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM. NIP. 19700701 199101 1 004 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	JUMARDIN, A. Md. P NIP. 19820127 201403 1 001 PENGATUR Tk. I, II/d				
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI SULAWESI BARAT	H. DARWIN JUSUF, SH, M.Si NIP. 19661231 199003 1 155 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	SYARFUDDIN, S.Ip NIP. 19830203 201001 1 023 PENATA MUDA, III/a				
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM NIP. 19640408 198603 1 023 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	ASMAUL HUSNA AMIN, SE NIP. 19880406 201101 2 014 PENATA MUDA Tk.I, III/b	AHMAD AMIRUDDIN, S.I.P, M. Ec. Dev NIP. 19821031 201001 1 018 PENATA MUDA Tk.I, III/b ADNAN NIP. 19811129 201001 1 016 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b SYARIFAH RAODAH NIP. 19721014 201408 2 001 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b			

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELOJARAN	PEMBANTU BENDAHARA PENGELOJARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	H. DARNO MAJID, S.Pd., M.Pd NIP. 19631228 198206 1 001 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	I GDE NGURAH ANDIANA, SE NIP. 19840813 201001 1 018 PENATA, III/c	JUPRI, S.Sos NIP. 19830810 201001 1 018 PENATA MUDA, III/a AMIRA A., SE NIP. 19850425 201410 2 002 PENATA MUDA, III/a SUARNI NIP. 19801231 201001 2 013 PENGATUR, II/c		
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	DR. JUNDA MAULANA, M.Si NIP. 19710608 199101 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	AZWAR ASMAR, SE NIP. 19810130 200604 1 005 PENATA MUDA Tk.I, III/b	NURASIAH, S.IP NIP. 19820919 200701 2 013 PENATA MUDA Tk.I, III/b NURSALAM NIP. 19820606 201001 1 023 PENATA MUDA, III/a LILISIANA NIP. 19831217 201001 2 035 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b		
34	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. AMUJIB, MM 19720511 199303 1 010 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	NURHAYATI, SE NIP. 19861110 201001 2 051 PENATA MUDA, III/a	NURDIJAH NURDIN NIP. 19821121 201001 2 024 PENATA MUDA, III/a SITTI NURHUSAIMAH D NIP. 19900118 201101 2 004 PENATA MUDA, III/a MARWA HAMDANI NIP. 19820121 201101 2 006 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b	SARIPAWATI, SE NIP. 19770228 201001 2 011 PENATA MUDA Tk.I, III/b	SUARDI RUSLI, SE NIP. 19861003 201410 PENATA MUDA, III/a (UPTB SAMSAT MAMU, ARIADI DUALIKA, S.Ip NIP. 19860416 200901 PENATA MUDA, III/a (UPTB SAMSAT PEMBA MATENG)
			SRI SALTI, SE NIP. 19770517 2010012 PENATA MUDA Tk.I, III/ (UPTB SAMSAT MAJENI) DEDDEN HARI SUMANTY NIP. 19890203 201101 1 PENATA MUDA Tk.I, III/ (UPTB SAMSAT POLMAT) MUH. SYALFUL IHSAN NIP. 19800718 201001 1 PENATA MUDA, III/a (UPTB SAMSAT MAMAS ABD. QADIR NIP. 19730706 201001 1 PENGATUR MUDA Tk.I, (UPTB SAMSAT PASANGKAYU)			

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELOMPOK	PEMBANTU BENDAHARA PENGELOMPOK	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN/ PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. AMUJIB, MM 19720511 199303 1 010 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	HERSANDI, S.Kom NIP. 19861107 201101 1 013 PENATA MUDA, III/a	RIZAL JUJRI NIP. 19840602 201101 1 013 PENATA MUDA, III/a ROSDIANA NUR, A.Md.,Kom NIP. 19830913 201101 2 016 PENGATUR TK.I, II/d MARDINSYAH NIP. 19870501 201001 1 005 PENGATUR II/c		
36	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT	DR. YAKUB SOLON, SH., M.Pd NIP. 19651005 198812 1 002 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	KORNELIUS PALLUNAN, SE NIP. 19770601 200604 1 030 PENATA MUDA TK.I, III/b	FIRMAN, SE NIP. 19831115 201001 1 025 PENATA MUDA TK.I, III/b YENI LIES NIP. 19830327 201001 2 030 PENGATUR MUDA TK.I, II/b UMAR NIP. 19770325 201001 1 010 PENGATUR MUDA TK.I, II/b		
37	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Dr. H. MUH. JAMIL BARAMBANGI, M.Pd NIP. 19631120 199203 1 001 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	NURTAMININGSIH, S. Kom NIP. 19830322 201101 2 006 PENATA MUDA TK.I, III/b	FRANS PAKIDING, ST NIP. 19840413 201101 1 009 PENATA MUDA TK.I, III/b NURYANTI MUCHSIN NIP. 19850323 201001 2 053 PENATA MUDA TK.I, III/b SYARIFUDDIN, S. Ag NIP. 19770502 2011 1 1 010 PENATA MUDA TK.I, III/b		
38	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI BARAT	A. AHMAD REFI, SE., MM. NIP. 19750901 200604 1 019 PEMBINA, IV/a	RIYANTI AGUSTIN NIP. 19850812 201001 2 040 PENGATUR MUDA TK.I, II/b	ARMAWATI, SKM., M. Kes NIP. 19811231 200902 2 004 PENATA, III/c SITTI FATIMAH, SP NIP. 19721023 201001 2 004 PENATA MUDA, III/a ASLIYAH KAMAL, SE NIP. 19760218 201410 2 001 PENATA MUDA, III/a	FERONIKA SATTU NIP. 19720205 201410 2 002 PENGATUR MUDA, II/a	SUKURIA SAKKU, NIP. 19850406 200 PENATA MUDA, III

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBAHTU BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PERSEMBAHAN	BENDAHARA PEREMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
39	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	drg. HARTINI B. MM NIP. 19610421 198903 2 008 PEMUDA UTAMA, MUJIB, II/7c	RASMIA AR. SKM NIP. 19850716 201101 2 018 PEMUDA, III/5c	HERAWATI HANZAL, SKM NIP. 19851009 201001 2 018 PEMUDA, III/5c  IRSAL, S. Ip NIP. 19850406 201804 1 004 PEMUDA MUDA, III/4  MULAWATI, A. Md. Kab. NIP. 19861203 201001 2 029 PENCAHTUR, II/7c	STE WASIDANI, SKM NIP. 19780707 201001 2 009 PEMUDA, III/5c	HJ. SUNAR, SKM NIP. 19691231 199 PEMUDA, IV/4  ANDI ANHAR NIP. 19850402 2001 JURU, I/6

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. M. ALI BAAL MASDAR